

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan merupakan suatu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang didirikan untuk memperoleh keuntungan. Semakin tahun semakin banyak perusahaan yang memutuskan untuk menjadi perusahaan *Go Public* di Indonesia. Diperkirakan di akhir tahun 2018 jumlah perusahaan yang ingin menjadi perusahaan *Go Public* semakin meningkat. Akibat dari meningkatnya perusahaan *Go Public* maka akan semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan menunjukkan daftar Kantor Akuntan Publik yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan per tanggal 01 Mei 2018 sejumlah 444 KAP. Dengan semakin banyaknya KAP yang ada, maka perusahaan semakin banyak memiliki pilihan untuk mempertahankan auditor yang lama atau melakukan *Auditor Switching*.

Dalam menjalankan suatu usaha, diperlukan suatu pencatatan yang berisi informasi mengenai semua aktivitas keuangan perusahaan. Pembuatan laporan keuangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan *Go Public*. Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah perusahaan. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum yaitu penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus

kas dari perusahaan yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari perusahaan yang terdiri dari aset, kewajiban, kekayaan bersih, beban, dan pendapatan (termasuk keuntungan dan kerugian), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut dilengkapi dengan catatan, yang akan membantu dalam memprediksi arus kas masa depan.

Laporan keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu bisnis. Laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan, menunjukkan kredibilitas perusahaan, suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan, serta digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan secara wajar, dapat dipercaya serta dapat diandalkan. Untuk menjamin kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, maka diperlukan seorang auditor yang independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu perusahaan.

Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab manajemen yang perlu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak ketiga yang independen. Hal ini penting karena jika tidak diaudit, terdapat kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Agoes, 2017:10).

Nilai *auditing* sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil *sudut pandang* yang tidak *bias* dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit. Bila auditor adalah penasehat untuk klien, seorang *banker*, atau orang lainnya, auditor tidak bisa dianggap independen. Independensi dianggap sebagai karakteristik auditor yang paling kritis. Alasan bahwa banyak pemakai berbeda yang ingin bergantung pada laporan akuntan publik untuk kewajaran dari laporan keuangan adalah harapan dari sudut pandang yang tidak *bias*. Oleh karenanya tidak mengherankan bila independensi merupakan hal pertama yang dibahas dalam peraturan etika (Arens *et al.*, (2001:124). Salah satu faktor yang dapat menyebabkan hilangnya independensi seorang auditor adalah hubungan yang lama di antara auditor dan klien. Hal ini dapat menghasilkan sebuah kenyamanan di antara kedua belah pihak, sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang dikeluarkan oleh seorang auditor.

*Auditor switching* telah ditemukan memiliki implikasi terhadap kredibilitas nilai laporan dan biaya monitoring aktivitas manajemen (Nazri, dkk. 2012:89). Selain itu, fakta mengenai penyebab *auditor switching* suatu perusahaan tidak pernah dicantumkan di dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, isu-isu mengenai *auditor switching* secara ekstensif telah diteliti di negara-negara maju diantaranya adalah riset-riset di beberapa negara Asia seperti Hongkong, Singapura, Korea dan Malaysia (Ismail, 2008). *Auditor switching* dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas dari hasil audit laporan

keuangan perusahaan. Untuk menghindari adanya *opinion shopping* dikalangan perusahaan maka beberapa negara menerapkan peraturan mengenai *auditor switching*.

Pemerintah di Indonesia telah mengatur kewajiban *auditor switching* yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik” sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003. Peraturan tersebut dianggap kurang memadai sehingga dipandang perlu adanya pembaharuan, sehingga peraturan disempurnakan kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan mengenai *auditor switching* pada pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu perusahaan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang *auditor switching*, yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik yaitu selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit atas informasi keuangan setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut, maka perusahaan harus melakukan *auditor switching* dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan.



Diharapkan seorang auditor dapat mempertahankan independensinya agar kualitas laporan yang dihasilkan dapat diandalkan.

Untuk meningkatkan sebuah independensi dari seorang auditor perlu dilakukan *auditor switching*. *Auditor Switching* merupakan pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh suatu perusahaan. *Auditor Switching* dapat terjadi secara *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang terjadi secara *mandatory* yaitu pergantian auditor atau KAP yang dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik, sedangkan *auditor switching* yang terjadi secara *voluntary* (sukarela) adalah pergantian auditor atau KAP yang terjadi karena suatu alasan di luar peraturan yang telah ditentukan (Oktaviana dkk.2017)

Di Indonesia perusahaan yang melakukan *auditor switching* masih relatif rendah. Hal ini didukung oleh data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut serta menyediakan informasi yang lengkap mengenai Kantor Akuntan Publik pada tahun 2014-2017 sebanyak 912 perusahaan. Dari jumlah tersebut hanya terdapat 154 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Berikut data perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014-2017 yang melakukan *auditor switching* pada tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pergantian KAP pada Perusahaan yang terdaftar di BEI Tahun**  
**2014-2017**

Tahun	Melakukan Auditor Switching		Tidak Melakukan Auditor Switching		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2014	29	13%	199	87%	228	100%
2015	32	14%	196	86%	228	100%
2016	50	22%	178	78%	228	100%
2017	43	19%	185	81%	228	100%

**Sumber: Data sekunder diolah, 2019.**

Pergantian KAP di Indonesia dikategorikan fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terdapat 29 perusahaan yang melakukan pergantian KAP. Ditahun 2015 jumlah tersebut meningkat menjadi 32 perusahaan. Jumlah tersebut meningkat lagi di tahun 2016 yaitu sebanyak 50 perusahaan telah melakukan pergantian KAP. Namun di tahun 2017 jumlah perusahaan yang melakukan pergantian KAP mengalami penurunan menjadi 43 perusahaan. Penurunan tersebut menjadikan perhatian bagi penelitian ini, dimana akan muncul faktor-faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching*.

Faktor pertama yang kemungkinan dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching* adalah opini audit. Opini audit adalah suatu pendapat dari seorang auditor atas laporan keuangan perusahaan yang telah diperiksa untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Opini audit menjadi sumber informasi bagi para pengguna laporan keuangan untuk

mengambil suatu keputusan. Seorang manajemen pasti menginginkan hasil laporan auditor dengan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Apabila hasil laporan auditor tidak sesuai dengan keinginan, maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan *auditor switching*. Hasil penelitian Putra dan Suryanawa (2016), Tisna dan Suputra (2017) memperoleh hasil bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun bertolakbelakang dengan hasil penelitian Nasir (2018) dan Karlina dkk., (2017) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Reputasi KAP sangat menentukan kualitas hasil dari laporan auditor. Kualitas hasil auditor merupakan salah satu pertimbangan yang penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, KAP yang mempunyai kualitas tinggi, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Dalam penelitian ini, KAP yang memiliki reputasi diproksikan dengan KAP *The Big Four*. KAP *The Big Four* merupakan KAP yang mempunyai keahlian dan reputasi tinggi dibanding dengan KAP *Non The Big Four* Perusahaan yang sudah menggunakan KAP *The Big Four*, cenderung untuk tidak melakukan *auditor switching*. Menurut penelitian Putra dan Suryanawa (2016), Suryandari (2013) dan Ansar (2017) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini bertolakbelakang dengan hasil penelitian dari Karlina dkk., (2017) yang menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*.

*Financial Distress* merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Terdapat beberapa

faktor yang mengakibatkan perusahaan mengalami *financial distress*, salah satunya yaitu kesalahan manajemen dalam mengambil suatu keputusan sehingga berpengaruh terhadap potensi perusahaan. Perusahaan yang mengalami *financial distress*, cenderung tidak melakukan *auditor switching*. Temuan Wijaya dan Rasmini (2015) menunjukkan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun hasil penelitian ini bertolakbelakang dengan penelitian Suryandari (2013) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Menurut Putra dan Suryanawa (2019) menyatakan bahwa *financial distress* memperlemah pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*. Perusahaan akan cenderung melakukan *auditor switching* jika mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian. Namun, jika perusahaan sedang mengalami *financial distress* maka perusahaan tetap akan mempertahankan Kantor Akuntan Publiknya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan kreditur.

*Financial Distress* memperlemah pengaruh reputasi KAP terhadap *auditor switching* (Putra dan Suryanawa, 2019). Perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi kurang baik akan cenderung melakukan *auditor switching*. Namun, jika perusahaan sedang mengalami *financial distress*, maka perusahaan akan tetap menggunakan jasa KAP sebelumnya, karena perusahaan menilai bahwa auditor sudah layak untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan.



Berdasarkan penelitian diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian I Gusti Bagus Bayu Pratama Putra dan I Ketut Suryanawa (2016). Namun terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang pertama adalah penambahan variabel independen, yaitu *fee audit*. Alasan ditambahkan variabel tersebut karena *fee audit* juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching*. Apabila *fee audit* yang dibebankan oleh KAP terlalu tinggi, maka perusahaan akan cenderung untuk mencari KAP lain yang menawarkan *fee audit* rendah.

*Fee audit* adalah imbalan yang diterima oleh seorang auditor atas performa yang sudah dilakukan oleh auditor yaitu menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan (klien). *Fee audit* berasal dari pihak eksternal perusahaan yaitu berasal dari auditor. Penawaran *fee audit* yang terlalu tinggi akan mengakibatkan perusahaan mencari penawaran *fee audit* yang lebih rendah dari Kantor Akuntan Publik lainnya. Wijaya dan Rasmini (2015) serta Diandika dan Badera (2017) menyatakan bahwa *fee audit* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Menurut Diandika dan Badera (2017) *financial distress* memperkuat pengaruh *fee audit* terhadap *auditor switching*. Ketika *fee audit* yang dibebankan oleh KAP terlalu besar, maka perusahaan akan cenderung melakukan *auditor switching*. Perusahaan tidak mampu memenuhi *fee audit* yang dibebankan oleh

KAP, karena perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*).

Perbedaan yang kedua yaitu mengenai populasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul “ Pengaruh Opini Audit, Reputasi KAP dan *Fee Audit* Terhadap *Auditor Switching* Dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)”.

## 1.2 Ruang Lingkup

Mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* dan keterbatasan kemampuan peneliti maka dalam penelitian ini akan diberikan pembatasan masalah diantaranya adalah:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu opini audit, reputasi KAP dan *fee audit* sebagai variabel independen dan *financial distress* sebagai variabel moderasi.
2. Menggunakan data laporan keuangan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adanya suatu permasalahan di Indonesia adalah masih terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur *auditor switching*, yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas perusahaan. Namun, di luar dari peraturan tersebut, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*. *Auditor switching* tersebut diperkirakan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal perusahaan.

Di Indonesia terdapat 912 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017 secara berturut-turut. Dari jumlah tersebut hanya terdapat 154 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh opini audit, reputasi Kantor Akuntan Publik dan *fee audit* terhadap *auditor switching* dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Opini Audit, Reputasi KAP, *Fee Audit* terhadap *Auditor Switching* dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori agensi yang menggambarkan adanya hubungan atau kontrak dimana prinsipal memberikan

wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan. Hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal sering menimbulkan konflik dikarenakan perbedaan kepentingan dan informasi asimetri, sehingga diperlukan pihak ketiga yaitu auditor independen untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Apabila agen menganggap auditor sebelumnya tidak sesuai dengan kepentingan agen dan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan prinsipal maka agen akan melakukan *auditor switching*.

### 1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya:

#### 1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan di dunia pendidikan, khususnya di bidang pengauditan mengenai *auditor switching*.

#### 2. Bagi Profesi Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi seorang akuntan publik tentang praktik *auditor switching* yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

#### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.